

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN AGAMA PULAU  
PUNJUNG**



**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Jl. Lintas Sumatra KM. 4 Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung



PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

NOMOR : W3.A18/50 /OT.01.3/I/2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama PULAU PUNJUNG perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK /OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama PULAU PUNJUNG tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pulau Punjung

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Pulau Punjung agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PULAU PUNJUNG  
pada tanggal 02 Januari 2020

---

Ketua Pengadilan Agama PULAU PUNJUNG

AZIZAH ALI, SHI. MH  
NIP. 198210212005022002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan Jumlah perkara yang ada (sisa awal tahun tambah perkara yang masuk)</p> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara sehingga semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas masyarakat terhadap putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara sehingga semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas masyarakat terhadap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		putusan pengadilan		
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Peninjauan Kembali) dengan jumlah putusan perkara sehingga semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas masyarakat terhadap putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan berdasarkan Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi  <b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding,	Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	upaya hukum		
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Perbandingan Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk  <b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan  <b>Catatan :</b> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan ( <i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum</p>	<p>Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Pencari keadilan golongan tertentu</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	<p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)</p>	<p>Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjut dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



**KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	<p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%</math></p>	Panitera	Laporan Bulanan

			Jumlah Responden Pencari Keadilan			dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____  Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi _____  Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu _____  Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<p>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------